



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014: DPR Tetap Mengacu pada Hasil Audit BPK
Tanggal : Rabu, 02 September 2015
Surat Kabar : Suara Pembaruan
Halaman : A7

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, kemarin. DPR RI menyoroti pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dalam masa transisi pemerintahan ini.

WAKIL Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menebak, dalam membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun anggaran berikutnya, DPR tetap mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun sebelumnya. Termasuk dalam pembahasan RAPBN 2016, DPR mempertimbangkan hasil audit BPK pada pelaksanaan APBN 2014.

"DPR juga tetap memperhatikan faktor penyerasian anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L). Pada prinsipnya, DPR setuju dengan sistem *reward and punishment* dalam evaluasi anggaran tahun 2014 terkait hasil pemeriksaan BPK," kata Taufik, usai memimpin rapat paripurna.

Pada tahun anggaran 2014, terdapat 85 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang diaudit dan diberikan opini oleh BPK. Dari 85 LKKL, sebanyak 62 di antaranya mendapat opini Wajar Tanpa Pengetahuan (WTP), 17 mendapat opini Wajar Dengan Pengetahuan (WD) dan 7 lainnya mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Sementara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKKP) mendapat opini WDF/mash sama dengan opini tahun 2013.

Polaikus F-PAN itu mengakui, tidak mudah untuk mempertahankan kinerja penyerasian anggaran K/L. Sehingga tak dipungkiri, ada K/L yang sampai dua tahun berturut-turut mendapatkan opini TMP. Taufik melihat, kondisi ekonomi kekinian yang tidak bersahabat juga turut mempengaruhinya. Termasuk pengaruh manajerial, persoalan birokrasi, atau penggunaan anggaran dari pemerintahan sebelumnya.

"Permasalahan setiap K/L itu berbeda. Kami juga melihat kinerja setiap K/L itu mencerminkan kemampuan masing-masing menteri yang memimpin. Tapi ini juga harus

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 DPR tetap Mengacu pada Hasil Audit BPK



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Agus Hermanto menerima Pendapat Akhir Pemerintah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014.

menjadi perhatian pemerintah. Harus ada upaya supaya segera, anggaran tetap baik meskipun pada masa transisi" imbuhnya.

Polaikus asal daerah pemilihan Jawa Tengah itu menebak, K/L yang berturut-turut mendapat opini TMP tentu harus mendapat perhatian. Tentunya, terhadap hal itu harus dicari solusi yang terbaik.

"Konkretnya nantinya pada pembahasan anggaran masing-masing K/L. Apakah kemudian anggarannya akan dikurangi oleh pemerintah atau tidak, tentu akan diputuskan setelah melalui dinamika pembahasan," katanya.

Taufik juga mengingatkan agar pemerintah tidak tergeses, menilai anggaran bagi Kementerian yang tidak mampu memperbaiki kinerjanya. Pasalnya, tidak mungkin menambah anggaran kepada K/L yang memiliki laporan keuangan yang buruk. Dikhwatirkan, penambahan anggaran itu justru malah membebani.

"Rapor jeklek kementerian akan menjadi pertimbangan yang sangat spesifik. Meski demikian, DPR tidak akan serta merta menurunkan anggaran terhadap kementerian bersangkutan.

DPR JUGA TETAP MEMPERHATIKAN FAKTOR PENYERAPAN ANGGARAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA (K/L). PADA PRINSIPNYA, DPR SUJUJU DENGAN SISTEM REWARD AND PUNISHMENT DALAM EVALUASI ANGGARAN TAHUN 2014 TERKAIT HASIL PEMERIKSAAN BPK.

Taufik Kurniawan Wakil Ketua DPR RI

Lebih lanjut Jazilul menyatakan, dari Pembahasan Tingkat I, maka Banggar sepakat agar pemerintah meningkatkan kualitas laporan keuangan terutama terhadap LKPP, LKBUN, dan LKKL yang masih mendapatkan opini audit WDP atau TMP. Pemerintah juga diminta mendukung dan menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan hasil pemeriksaan atas LKPP 2014.

"Pemerintah harus memonitor persyaratan anggaran secara maksimal dengan tetap berpedoman pada prinsip efisiensi, ekonomis, dan efektif," tambah Jazilul.

Jazilul menambahkan, pemerintah diminta merencanakan dan menyusun statistik keuangan pemerintah yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat menyajikan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan pemerintah.

Sementara itu, dalam pendapat akhir pemerintah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa pemerintah telah dan akan terus konsisten berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Pemerintah juga akan melaksanakan perbaikan terhadap pencatatan aset tetap, penyempurnaan sistem akuntansi hibah, perbaikan pengelolaan rekening pemerintah, peringkat kualitas SDM, dan peningkatan komitmen para mentor/pimpinan lembaga untuk melakukan pengelolaan keuangan yang baik, serta peningkatan kualitas LKKL. (sf)



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan didampingi Agus Hermanto saat memimpin Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2014.